

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan tata Kelola penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah di setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Jika sebelumnya sistem pelaporan keuangan dilakukan secara manual atau tradisional. Pada saat ini telah menggunakan aplikasi yang merupakan sistem informasi yang memuat keseluruhan data pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Saat ini rata-rata semua organisasi baik yang mencari laba (profit) atau instansi pemerintah menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi telah berkembang seiring berjalannya perkembangan teknologi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah (Nasution & Agustina, 2019).

Pemerintah daerah memberikan laporan keuangan wajib disajikan dengan berkualitas, begitu banyak yang mengandalkan suatu informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kepentingan yang berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintah yaitu masyarakat, wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi serta pihak pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan memiliki kualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Proses pengelolaan keuangan daerah dalam suatu instansi tentunya harus disusun dengan semaksimal mungkin agar memperoleh pengelolaan keuangan yang efektif (Aprilia N et al., 2019).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemerintah yang baik menurut pemerintah untuk memiliki teknologi informasi yang baik agar dapat mengakses dan mengelola informasi serta menggunakannya secara cepat, akurat dan efisien. Oleh karena nya, pemerintah tertarik menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan public baik pemerintah pusat maupun daerah (Sujarweni, 2020).

Saat ini teknologi dapat memberikan informasi yang akurat, relevan dan lengkap sangat diperlukan. Sistem informasi cukup penting pada sebuah sektor publik atau instansi pemerintah adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan dan memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan (Romney, Marshal B., 2019). Sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan memberikan informasi tentang keadaan keuangan instansi termasuk aset, kewajiban dan kekayaan bersihnya. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai Kesehatan suatu Lembaga atau instansi serta memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan secara keseluruhan (Astuti, 2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 menyatakan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas, kinerja keuangan dan arus kas. Informasi ini berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi sistem informasi akuntansi setiap organisasi bisnis, terutama dalam pengolahan data yang telah berubah dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi sebagai sarana pengolahan data. Penggunaan teknologi informasi di era saat ini merupakan elemen penting dalam aktivitas perusahaan, baik swasta maupun instansi pemerintahan. Sistem informasi tentunya membawa pengaruh besar terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Perkembangan akuntansi sektor publik saat ini, wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan instansi pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Organisasi sektor public yang berkaitan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan public untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas (Ayu et al., 2016).

Pemimpin lembaga harus mengawasi operasi pemerintah untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah tentu memiliki tujuan rencana kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan yang kemudian dibuatlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja tersebut. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa tujuan pemerintah daerah terpenuhi, seperti keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (Sujarweni, 2020). Pemerintah telah berusaha untuk memberlakukan kewajiban kepada semua instansi dalam hal ini sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pengguna laporan keuangan yakni masyarakat, anggota parlemen, badan pengawas serta pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Pratiwi et al., 2018).

Faktor yang dapat mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menjadi lebih baik yaitu dengan kualitas laporan keuangan yang baik juga. Menurut Bastian (2018) Laporan keuangan merupakan suatu representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor dimana untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Laporan keuangan menyediakan tentang posisi keuangan yaitu, neraca, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aktiva, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan laporan realisasi anggaran. Pelaporan keuangan mempunyai kualitas biasanya mempunyai karakteristik mudah dipahami, diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan.

Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi memiliki 23 bidang, diantaranya Sekretaris, Sub Bagian Umum Keuangan dan Aset, Sub Bagian Kepegawaian Program dan Pelaporan, Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan, Sub Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan, Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Sub Bidang Data dan Informasi Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Subbidang Retribusi, Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Sub Bidang Data dan Informasi Retribusi Daerah, Bidang Anggaran, Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung, Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan, Sub Bidang Penatausahaan Belanja Langsung, Sub Bidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Akuntansi Belanja, dan Sub Bidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya beberapa bidang pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tentunya proses pelaporan keuangan tetap dilakukan setiap bidang tetapi tetap bermuara pada bidang akuntansi dan pelaporan dalam hal ini laporan induk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (BPKPD, 2023).

Pada sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi juga dapat mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan. Dengan sistem informasi akuntansi yang akurat, relevan dan lengkap akan dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas (Jannah, 2020). Hal ini didukung dalam penelitian Zarlin & Khairani (2017) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin dapat bekerja secara optimal, produktif, komprehensif, mandiri, tepat waktu dan yang terpenting dapat bekerja sama sebagai satu tim sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dibandingkan. Tetapi hasil penelitian (Zarlin & Khairani, 2017) belum tentu sesuai atau sama dengan hasil penelitian ini, karena adanya perbedaan yaitu perbedaan tahun pelaksanaan dan fenomena yang berbeda.

Bagaimana lembaga pemerintah menggunakan teknologi sistem informasi untuk memberikan manfaat dan bagaimana hal itu berdampak pada kinerja perusahaan adalah indikator keberhasilan perusahaan. Salah satu sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik dan tanpa kesalahan apabila terdapat sumber daya manusia yang berbakat menjadi kekuatan pendorong di belakang sistem informasi akuntansi.

Kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja pegawai sangat berhubungan karena suatu organisasi membutuhkan keempatnya untuk memenuhi tugasnya. Penelitian ini terjadi karena masih ada beberapa hambatan teknis yang dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan lancar, yang dapat mengganggu proses pembangunan pemerintahan di daerah. salah satu komponen yang mempengaruhi laporan keuangan adalah kurangnya sistem pengendalian internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan seringnya keterlambatan dalam pengelolaan dan penyerahan laporan keuangan (BPKPD, 2023). Menurut penelitian yang telah dilakukan Wulandari & Octaviani (2020) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan (Leiwakabessy, 2020) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah yang selalu disampaikan setiap tahunnya.

Menurut Penelitian yang dilakukan (Pujanira & Taman, 2017) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan (Wijayanti, 2017) mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena tidak signifikan.

Jika benar bahwa tidak ada sinkronisasi antara kedua sistem yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, akan menjadi pertanyaan apakah sistem informasi pengendalian internal dan kinerja pegawai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan (N. L. W. T. Lestari & Dewi, 2020) pembeda penelitian ini terletak pada penambahan variabel kinerja pegawai, peneliti menambah variabel kinerja pegawai dikarenakan setiap organisasi memiliki keinginan untuk mencapai suatu hasil yang optimal dan berkualitas, untuk mencapai keinginan tersebut, kinerja pegawai mempengaruhi organisasi yang memiliki pegawai pada organisasi tersebut, kinerja yang rendah dapat membawa dampak negatif pada perusahaan seperti kinerja pegawai tidak akan berkembang, terjadi banyak kesalahan dalam bekerja dan hasil kerja menjadi jauh tidak memenuhi standar sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan. Pembeda lainnya yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, alasan peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Provinsi Jambi)”.  
Daerah Provinsi Jambi)”).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti menemukan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
3. Apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
4. Apakah sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan membantu penelitian tambahan tentang bagaimana kinerja pegawai, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi..

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam menerapkan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja pegawai untuk meningkatkan laporan keuangan organisasi.

3. Bagi Pembaca

bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi untuk penelitian masa depan.